

DINAMIKA PENDUDUK KABUPATEN MERANGIN – PROVINSI JAMBI

(Population Dynamics of Merangin Regency – Jambi Province)

***Diana Wulandari, Iswandi Umar**

Program Magister (S2) Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial - Universitas Negeri Padang, Indonesia

Email: diana79wulandari@gmail.com

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penduduk Kabupaten Merangin, termasuk komposisi dan distribusi penduduknya, serta kualitas hidup penduduk dari segi pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan. Pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Jumlah penduduk Kabupaten Merangin terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, jumlah penduduk mencapai 377.905 jiwa, dan meningkat menjadi 383.480 jiwa pada tahun 2018, naik sebanyak 1,48 persen; 2) Kabupaten Merangin merupakan daerah dengan pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi; 3) Tingkat pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Merangin sudah cukup memadai; 4) Tingkat kemiskinan cenderung rendah, dan tren penurunannya semakin cepat. Dapat disimpulkannya, penelitian ini menyoroti pertumbuhan penduduk yang cepat di Kabupaten Merangin, didukung oleh tingkat pendidikan dan kesehatan yang memadai serta tingkat kemiskinan yang rendah dan menurun.

Kata Kunci: Dinamika Penduduk, Distribusi Penduduk, Tingkat Kemiskinan, Kabupaten Merangin.

ABSTRACT: *This research aims to analyze the population dynamics of Merangin Regency, including the composition and distribution of the population, as well as the quality of life of the population in terms of education, health and poverty. The approach used is quantitative and qualitative descriptive methods. The research results show that: 1) The population of Merangin Regency continues to increase from year to year. In 2017, the population reached 377,905 people, and increased to 383,480 people in 2018, an increase of 1.48 percent; 2) Merangin Regency is an area with relatively high population growth; 3) The level of education and health in Merangin Regency is quite adequate; 4) Poverty levels tend to be low, and the downward trend is accelerating. In conclusion, this research highlights the rapid population growth in Merangin Regency, supported by adequate levels of education and health as well as low and decreasing poverty levels..*

Keywords: *Population Dynamics, Population Distribution, Poverty Level, Merangin Regency.*

PENDAHULUAN

Merangin merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jambi, berasal dari pemekaran Kabupaten Sarolangun Bangko. Kabupaten Merangin terbentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 54/1999 pada tanggal 4 Oktober. Bersama dengan kabupaten Sarolangun, Tebo, Muaro Jambi, dan Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Merangin tetap menjadi Kabupaten Induk dengan ibukota Pemerintahan di Kota Bangko, yang sebelumnya juga merupakan ibukota Kabupaten Sarolangun Bangko sebelum pemekaran. Lambang Kabupaten Merangin adalah "Tali Udang Tambang Teliti", melambangkan pertemuan dua suku, yaitu suku batin dan suku penghulu, serta kesatuan dan persatuan dalam adat istiadat mereka (Aprillia, 2019).

Secara geografis, Kabupaten Merangin terletak antara 101°32'11"-102°50'00" Bujur Timur dan 1°28'23"-1°52'00" Bujur Selatan, dengan luas wilayah 7.679 km² atau 745.130 ha, terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi. Batas wilayahnya adalah Sebelah Timur dengan Kabupaten Sarolangun, Sebelah Barat dengan Kabupaten Kerinci, Sebelah Utara dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo, serta Sebelah Selatan dengan Kabupaten Lebong (Provinsi Bengkulu). Topografi wilayahnya dibagi menjadi dataran rendah, dataran sedang, dan dataran tinggi, dengan ketinggian berkisar antara 10-1.206 mdpl (Kalima dkk., 2019; Bakhtiar dkk., 2020).

Kepadatan penduduk Merangin pada tahun 2017 mencapai 377.905 jiwa, meningkat 1,48 persen pada tahun 2018. Pola penduduk menurut kelompok umur relatif stabil, dengan persentase penduduk usia 15-64 tahun sebesar 68,04 persen pada tahun 2018 (Himawan, 2022). Untuk mengatasi pertumbuhan penduduk, diperlukan kebijakan dan program-program dari Pemerintah daerah, seperti program Keluarga Berencana (KB), pelayanan kesehatan, transmigrasi, peningkatan mutu pendidikan, dan produksi pertanian. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan ketersediaan lapangan kerja yang memadai agar pertumbuhan ekonomi dapat beriringan dengan pertumbuhan penduduk. Dengan adanya berbagai program tersebut, diharapkan dapat mengelola pertumbuhan penduduk secara lebih terarah dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks teori penduduk dan pembangunan, penambahan penduduk dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Program KB dan transmigrasi menjadi upaya dalam mengatur pertumbuhan penduduk. Kendala dalam program transmigrasi meliputi kendala struktural, substansial, dan teknis operasional. Peningkatan mutu pendidikan juga penting, dengan sekolah yang memiliki nilai-nilai tinggi, hasil ujian yang baik, dukungan dari berbagai pihak, sumberdaya yang memadai, dan kurikulum yang relevan. Di sektor pertanian, campur tangan Pemerintah dapat membantu mencapai swasembada pangan, seperti yang terjadi pada Revolusi Hijau di Indonesia pada tahun 1984 (Ulum & Ngindana, 2017). Tulisan dalam artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis, serta menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Merangin dalam mengatasi pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat.

METODE PELAKSANAAN

2.1 Pendekatan

Artikel ini mengulas hubungan antara kependudukan dan perubahan pola produksi pertanian pangan, khususnya pada tanaman padi di sawah. Beberapa variabel yang saling terkait dan dianggap penting dalam inti permasalahan adalah sejarah perkembangan penduduk dan pangan, teknologi pola tanam dan tumpang sari, kepadatan penduduk serta potensi pengembangan produksi pangan, serta kelembagaan dan ketenagakerjaan di pedesaan. Pendekatan ini, yang telah digunakan dengan baik dalam mengungkap permasalahan serupa pada kasus pertanian pangan di pedesaan (Bachrein, 2010), membahas bagaimana petani berusaha menerapkan pola produksi yang lebih berorientasi pada pemenuhan konsumsi sendiri.

2.2 Tahapan Pelaksanaan

Dalam dinamika kependudukan, tahapan pelaksanaannya meliputi beberapa langkah, antara lain: perhitungan proyeksi penduduk secara bertahap dari tingkat RT hingga tingkat kabupaten. Hasil proyeksi penduduk per propinsi harus konsisten dengan jumlah penduduk hasil proyeksi nasional, begitu pula dengan jumlah penduduk hasil proyeksi per kabupaten harus konsisten dengan jumlah proyeksi penduduk propinsi yang bersangkutan. Untuk menyetarakan jumlah penduduk dari hasil proyeksi tersebut, iterasi perlu dilakukan.

2.3 Proses Pelaksanaan

Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, sebagai hasil kepedulian terhadap dinamika kependudukan atau laju pertumbuhan penduduk di daerahnya, meliputi penerapan berbagai ilmu, seperti dalam bidang pertanian, manajemen, teknologi informasi, sosial humaniora, kesehatan, dan disiplin ilmu lainnya, dalam bentuk kegiatan pengabdian yang dipublikasikan. Ini dapat berupa penerapan teknologi tepat guna, pelatihan, penyuluhan, pengembangan, implementasi sistem, dan lain sebagainya. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, karena dekat dengan lokasi peneliti dan mengalami peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi indikator yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dalam mengatasi kepadatan penduduk di wilayahnya.

PEMBAHASAN

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa dengan jumlah penduduk yang sangat besar merupakan potensi pembangunan yang besar dan bukanlah jaminan akan keberhasilan pembangunan. Karena dengan peningkatan jumlah penduduk tanpa diimbangi dan di ikuti dengan peningkatan kesejahteraan justru akan mengundang bencana dan dapat menimbulkan gangguan terhadap setiap program pembangunan yang

sedang dilaksanakan, dan dapat pula menimbulkan kesulitan bagi generasi yang akan datang. Karena pada dasarnya laju pertumbuhan penduduk yang besar mengakibatkan jumlah penduduk semakin membengkak (Jati, 2015). Seperti halnya yang terdapat di Kabupaten Merangin yang terdapat beberapa jumlah kecamatan yang masing-masing terdapat kepadatan jumlah penduduknya.

3.1 Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Peningkatan Jumlah Penduduk

Dari kondisi tersebut maka terdapat upaya Pemerintah daerah dalam mengatasi peledakan peningkatan jumlah penduduk yang berada di wilayahnya yaitu dengan cara:

- Program KB: Dengan laju pertumbuhan penduduk yang besar akan mempengaruhi rendahnya pendapatan seseorang dan menyempitnya lapangan pekerjaan, maka Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah berusaha memecahkan masalah diatas melalui program Kbnnya.
- Pelayanan sektor kesehatan: Dengan pelayanan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan termasuk keadaan gizi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup serta kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
- Transmigrasi: Upaya ini sebagai sarana penyebaran penduduk dan juga sebagai pemerataan penyebaran penduduk yang bertujuan untuk memperbaiki mutu kehidupan, dengan meningkatkan pendayagunaan sumber alam dan pembangunan daerah, memperluas lapangan pekerjaan.
- Memperluas dan mempertinggi mutu pendidikan dan keterampilan: Dengan meningkatkan mutu pendidikan maka semakin meningkat mengerahkan tenaga, pikiran dan penyediaan sarana, sehingga Pemerintah menyiapkan tenaga yang terampil dan berkemampuan serta dapat menjadikan manusia-manusia yang berwiraswasta dan dapat menciptakan lapangan kerja sendiri.
- Meningkatkan produksi pertanian: Walaupun pembangunan pertanian diarahkan untuk menetapkan swasembada pangan dan meningkatkan ekspor, usaha-usaha dalam pembangunan pertanian, juga ditunjukkan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, memperluas kesempatan kerja.

3.2 Dampak dari Pertumbuhan Penduduk

- Terhadap ekonomi, dampak kepadatan penduduk terhadap ekonomi adalah pendapatan perkapita berkurang karena menyempitnya lapangan pekerjaan, sehingga terjadi penurunan daya beli masyarakat di daerah tersebut. Hal ini menyebabkan kemampuan menabung masyarakat menurun, sehingga dana untuk pembangunan negara berkurang, akibatnya lapangan kerja menjadi berkurang dan pengangguran semakin meningkat.
- Terhadap kemiskinan, dikarenakan peningkatan jumlah penduduk sehingga terjadi peningkatan angka kemiskinan. Apabila sebagaimana fertilitas, mortalitas, dan migrasi sangat mempengaruhi jumlah penduduk pada suatu daerah termasuk Merangin.

- Terhadap kesehatan, dampak ini yang paling tinggi adalah kualitas penduduk (pendidikan, kesehatan, pendapatan, pekerjaan) dengan pendapatan yang rendah maka mereka tidak mampu memenuhi kecukupan gizi bagi kesehatan pangan. Dan hal ini menyulitkan mereka untuk mencapai hidup sejahtera atau berkualitas.
- Terhadap pendidikan, kepadatan penduduk akan menyebabkan semakin banyaknya problem masyarakat yang timbul sehingga menyebabkan terhambat atau sulit tercapainya sejahtera dengan kualitas hidup tinggi, dengan kepadatan penduduk maka lapangan kerja sangat sulit, sehingga pendapatan berkurang dan banyak anak-anak yang putus sekolah dikarenakan orang tua tidak mampu lagi membiayai pendidikan anaknya.

Adapun jumlah penyebaran penduduk Kabupaten Merangin dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Data Jumlah Penduduk Kabupaten Merangin.

Kecamatan	Laki-laki + Perempuan							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jangkat	9.111	9.241	9.365	9.481	9.596	9.701	9.799	9.890
Sungai tenang	9.176	9.299	9.415	9.523	9.629	9.727	9.815	9.898
Muara siau	9.402	9.472	9.542	9.611	9.686	9.758	9.830	9.902
Lembah masurai	20.610	21.546	22.506	23.485	24.499	25.529	26.579	27.653
Tiang pumpung	4.606	4.626	4.646	6.666	4.687	4.713	4.742	4.773
Pamenang	31.304	32.091	32.868	33.630	34.396	35.146	35.877	36.602
Pamenang barat	16.113	16.397	16.674	16.937	17.198	17.443	17.676	17.903
Renah pamenang	13.702	13.891	14.071	14.239	14.405	14.556	14.697	14.829
Pamenang selatan	9.845	10.020	10.191	10.354	10.516	10.670	10.815	10.954
Bangko	46.961	48.073	49.171	50.240	51.318	52.364	53.382	54.380
Bangko barat	10.842	11.016	11.183	11.343	11.499	11.646	11.785	11.916
Nalo tantan	12.061	12.372	12.679	12.961	13.286	13.584	13.876	14.164
Batang masumai	9.801	9.981	10.156	10.324	10.491	10.649	10.800	10.945
Sungai manau	9.667	9.752	9.837	9.921	10.011	10.099	10.186	10.274
Renah pemarap	11.828	11.970	12.104	12.228	12.349	12.457	12.556	12.646
Pangkalan jambu	6.250	6.326	6.398	6.465	6.530	6.588	6.640	6.690
Tabir	28.111	28.475	28.818	29.135	29.446	29.729	29.986	30.228
Tabir ulu	8.758	8.697	8.697	8.812	8.919	9.025	9.122	9.294
Tabir selatan	27.035	27.519	27.519	27.987	28.433	28.878	29.697	30.082
Tabir ilir	9.851	10.022	10.187	10.345	10.502	10.649	10.789	10.923
Tabir timur	7.519	7.618	7.711	7.798	7.883	7.960	8.031	8.097
Tabir lintas	7.595	7.768	7.939	8.104	8.271	8.432	8.588	8.741
Margo tabir	13.158	13.310	13.452	13.582	13.709	13.821	13.923	14.015
Tabir barat	8.272	8.329	8.387	8.443	8.505	8.622	8.622	8.681

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Merangin.

Sedangkan jumlah Kecamatan dan Desa serta Kelurahan yang terdapat pada Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Jumlah Desa yang terdapat pada tiap –tiap Kecamatan di Kabupaten Merangin

No	Nama kecamatan	Banyak Desa	Banyak Kelurahan	Dataran
1	Jangkat timur	14		Tinggi
2	Jangkat	11		Tinggi
3	Tiang punggung	6		Rendah
4	renah pamenang	8		Tinggi
5	muara siau	17		Rendah
6	Pamenang selatan	4	1	Rendah

No	Nama kecamatan	Banyak Desa	Banyak Kelurahan	Dataran
7	Lembah masurai	15		Tinggi
8	Renah pamenang	4		Rendah
9	Pamenang	13		Rendah
10	Tabir ilir	4	4	Rendah
11	Tabir selatan	8		Rendah
12	Tabir ulu	6		Rendah
13	Tabir	6		Rendah
14	pangkalan jambu	8		Sedang
15	Renah pembarap	12		Sedang
16	Pamenang barat	8		Rendah
17	Renah pamenang	4	5	Rendah
18	Bangko	4		Rendah
19	Bangko barat	6		Rendah
20	Nalo tantan	7		Rendah
21	Tabir timur	4		Rendah
22	Tabir lintas	5		Rendah
23	Margo tabir	6		Rendah
24	Tabir barat	14		Rendah

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Merangin.

Menurut BPS, kemiskinan dikonseptualkan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan sadar dan diukur dari sisi pengeluaran perkapita atau dengan kata lain kemiskinan dipandang dari ketidakmampuan ekonomi. Adapun dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik dan tingkat pendidikan yang rendah (Wijayanti & Wahono, 2005). Adriani & Handayani (2017) menjelaskan, perkembangan jumlah penduduk bisa menjadi faktor pendorong dan penghambat pengangguran. Untuk mengetahui kondisi pangan terkait dengan pertambahan jumlah penduduk, maka diperlukan data pangan diproyeksikan sampai tahun kedepannya, diantaranya dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Indikator

Skenario	Indikator
I	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi padi • Konsumsi padi • Jumlah penduduk
II	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penduduk • Konsumsi/kebutuhan padi • Produktivitas • Luas lahan pertanian berubah
III	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penduduk • Konsumsi/kebutuhan padi • Produktivitas • Luas lahan pertanian tetap

Rumus yang digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan (r) dan proyeksi adalah rumus geometris $P_t = P_o (1+r)^t$ (Syaadah, 2014; Suheri dkk., 2019)

Keterangan: P_t = jumlah produksi atau konsumsi padi di akhir tahun; P_o = jumlah produksi atau konsumsi padi awal tahun; r = laju pertumbuhan produksi atau konsumsi padi; t = rentang tahun perhitungan.

KESIMPULAN

Tulisan ini menyampaikan beberapa kesimpulan yaitu: 1) Kemiskinan dikonseptualkan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup dan diukur dari sisi pengeluaran perkapita, serta termanifestasi dalam kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah; 2) Pertumbuhan jumlah penduduk dapat menjadi faktor pendorong dan penghambat pengangguran, serta berdampak pada kondisi pangan. Pemerintah daerah mengatasi peledakan peningkatan jumlah penduduk melalui Program KB, pelayanan sektor kesehatan, transmigrasi, peningkatan mutu pendidikan dan keterampilan, serta peningkatan produksi pertanian; dan 3) Dampak dari pertumbuhan penduduk meliputi penurunan pendapatan perkapita, peningkatan kemiskinan, masalah kesehatan, dan kesulitan akses pendidikan. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam mengatasi dampak negatif pertumbuhan penduduk, termasuk program-program yang mendukung keluarga berencana, pelayanan kesehatan yang memadai, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan pendidikan dan pelatihan keterampilan guna meningkatkan kesempatan kerja dan taraf hidup masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, E., & Handayani, S. I. (2017). Pengaruh PDRB dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Merangin. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 8(2), 1-6.
- Aprillia, H. (2019). Persuasif pada Spanduk Pilkada Kabupaten Merangin Tahun 2017-2018. *Jurnal Tunas Pendidikan*, 2(1), 82-91.
- Bachrein, S. (2010). Pendekatan desa membangun di Jawa Barat: strategi dan kebijakan pembangunan perdesaan. *Analisis kebijakan pertanian*, 8(2), 133-149.
- Bakhtiar, R., Anshar, S., Zumiarti, Z., Fitri, A., & Prayitno, R. (2020). Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi Kabupaten Merangin Tentang Suku Anak Dalam. *UNES Law Review*, 2(4), 383-391.
- Himawan, R. (2022). Upayadinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Meningkatkan Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Merangin Provinsi Jambi (Doctoral dissertation, Ilmu pemerintahan).
- Jati, W. R. (2015). Bonus demografi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi: Jendela peluang atau jendela bencana di Indonesia. *Populasi*, 23(1), 1-19.
- Kalima, T., Damayanti, R., & Susilo, A. (2019). Rotan Potensial dari Hutan Bukit Lubuk Pekak, Merangin, Jambi. *Journal of Tropical Biodiversity and Biotechnology*, 4(1), 32-41.
- Syaadah, N. (2014). Analisis Dampak Pertambahan Penduduk Terhadap Penyerapan Angkatan Kerja. *Jurnal ilmiah pendidikan geografi*, 2(1), 61-62.

- Suheri, A., Kusmana, C., Purwanto, M. Y. J., & Setiawan, Y. (2019). Model prediksi kebutuhan air bersih berdasarkan jumlah penduduk di kawasan perkotaan Sentul City. *Jurnal Teknik Sipil Dan Lingkungan*, 4(3), 207-218.
- Ulum, M. C., & Ngindana, R. (2017). *Environmental Governance: Isu Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan Hidup*. Universitas Brawijaya Press.
- Wijayanti, D., & Wahono, H. (2005). Analisis Konsentrasi Kemiskinan di Indonesia Periode Tahun 1999-2003. *Economic Journal of Emerging Markets*, 10(3).